

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN**

T. Fitri Susanti dan Restu Agusti

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya km 12,5 simpang baru-Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kuesioner diberikan kepada 68 responden dan jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dianalisis lebih lanjut berjumlah 66 kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sedangkan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan komitmen organisasi merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Komunikasi, Implementasi SAP Berbasis Akrual.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, Indonesia memasuki era baru dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan mulai tahun 2015 ini semua instansi pemerintah baik pusat dan daerah wajib melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Penerapan SAP berbasis akrual ini diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, sehingga sekaligus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penggunaan basis akrual dalam era demokrasi langsung saat ini sangat dibutuhkan, karena masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan lebih membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari pelaporan keuangan pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah secara konsisten dan transparan memberikan informasi tentang akuntabilitas keuangan sehingga akhirnya masyarakat akan memberikan dukungan terhadap pemerintah.

Penerapan SAP berbasis akrual sudah menjadi keharusan karena sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan persiapan yang matang baik dari segi persiapan peraturan teknis pelaksanaan, struktur dan infrastruktur organisasi pemerintahan, budaya, sistem dan prosedur hingga kesiapan sumber daya manusia. Dari segi peraturan teknis pelaksanaan implementasi SAP berbasis akrual, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah. Permendagri tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

Kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual sangat penting sehingga diperlukan pengidentifikasian faktor-faktor yang dapat diduga mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan implementasi tersebut yaitu kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi SAP berbasis akrual

Setiawan (2004) menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan yaitu pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berarti melakukan berbagai tindakan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai

Implementasi SAP berdampak pada akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu, implementasi SAP juga berdampak secara tidak langsung terhadap kualitas layanan publik (Candra, 2010). Dengan implementasi SAP berbasis akrual akan dapat disusun laporan keuangan yang berkualitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Terdapat perubahan cukup signifikan dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 berjumlah 4 buah laporan, sedangkan menurut PP Nomor 71 tahun 2010 terdapat 7 buah laporan yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP 71 Tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (disingkat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013). Permendagri tersebut memberikan Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, panduan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah, menetapkan bagan akun standar pemerintah daerah dan format konversi penyajian LRA.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Tjiptoherijanto dalam Indriasari (2008) menyatakan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pengalaman juga bisa meningkatkan kompetensi seseorang.

Pengetahuan dapat diukur dari latar belakang pendidikan seseorang dan tingkat pendidikan seseorang. Pelatihan akan menyebabkan peningkatan pengetahuan tertentu bagi para pegawai serta meningkatkan ketrampilan pegawai yang akan digunakan dalam bekerja. Keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang pada waktu yang tepat (Gibson, 2003). Pengalaman adalah akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan, berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama alam, keadaan, gagasan dan penginderaan (Mathis, 2006).

Dengan adanya kesemua parameter kompetensi sumber daya manusia yaitu pengetahuan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki pegawai khususnya dalam penelitian ini adalah PPK-SKPD dan staf bagian keuangan akan sangat membantu dalam mendukung keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual.

Komitmen Organisasi

Ikhsan dan Ishak (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP. Sikap komitmen ditandai dengan pemahaman terhadap tujuan organisasi, keterlibatan dalam suatu pekerjaan dengan perasaan senang dan loyal terhadap organisasi.

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya (Ikhsan, 2008). Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna atau *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Menurut Sutarman (2009), teknologi informasi memiliki 6 (enam) fungsi, yaitu: menangkap (*capture*), mengolah (*processing*), menghasilkan (*generating*) dan menyimpan (*storage*), mencari kembali (*retrieval*) dan transmisi (*transmission*). Berdasarkan hal tersebut, teknologi informasi memiliki banyak fungsi yang bermanfaat yang membantu penggunaannya mengolah data menjadi informasi yang lebih baik, lebih cepat, lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Teknologi informasi lebih berperan dalam era globalisasi saat ini untuk mengatasi berbagai kompleksitas pekerjaan, tuntutan laporan yang cepat tanggap, dan persaingan usaha.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media menurut (Effendy, 2009). Sedangkan Agustino (2006) menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

Komunikasi merupakan alat utama yang digunakan dalam rangka melakukan interaksi yang berkesinambungan untuk pencapaian tujuan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui oleh para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Komunikasi Organisasi menurut Zelko dan Dance dalam Muhammad (1995) terbagi dua, yaitu: Komunikasi Internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antara manajer dengan komunikan yang berada dalam organisas (Effendy, 2009). Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, dan atasan dengan atasan. Komunikasi Eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi dengan pihak di luar organisasi. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk mendapatkan pengertian, kepercayaan, bantuan dan kerjasama dari pihak luar. Menurut Ichsan (2013), komunikasi dan strategi komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kontinuitas dan keberhasilan pelaksanaan implementasi akuntansi akrual. Komunikasi yang baik melalui kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi maka implementasi SAP berbasis akrual berjalan baik.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual

Wibowo (2007) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh sumber daya manusia dengan implementasi SAP dilakukan oleh Candra (2010). Dalam penelitiannya, diungkapkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAP. Sejalan dengan Candra (2010), Ardiansyah (2012) dan Adventana (2013) juga sama-sama mengungkapkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual

Ikhsan dan Ishak (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Perubahan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual memerlukan komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah termasuk SKPD untuk mengimplementasikannya.

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh komitmen organisasi terhadap SAP dilakukan oleh Aritonang (2010). Aritonang menyebutkan bahwa komitmen berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP Nomor 24 tahun 2005. Penelitian tentang akuntansi akrual dilakukan oleh Adventana (2013), Adventana mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H2: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual

Menurut Candra (2013) dukungan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAP. Sejalan dengan Candra, Ouda (2008) menggunakan *Basic Requirements Model for Successful Implementation of Accrual Accounting in the Public Sector*, dalam model persamaan tersebut salah satu komponen atau faktor yang dibutuhkan agar implementasi akuntansi akrual dapat dilaksanakan adalah kemampuan teknologi informasi (*Information Technology Capability*). Penelitian ylain ang berhubungan dengan pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan SAP diteliti oleh Aritonang (2010). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perangkat pendukung berupa teknologi informasi (komputer, *hardware*, *software*) berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 tahun 2005. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H3: Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

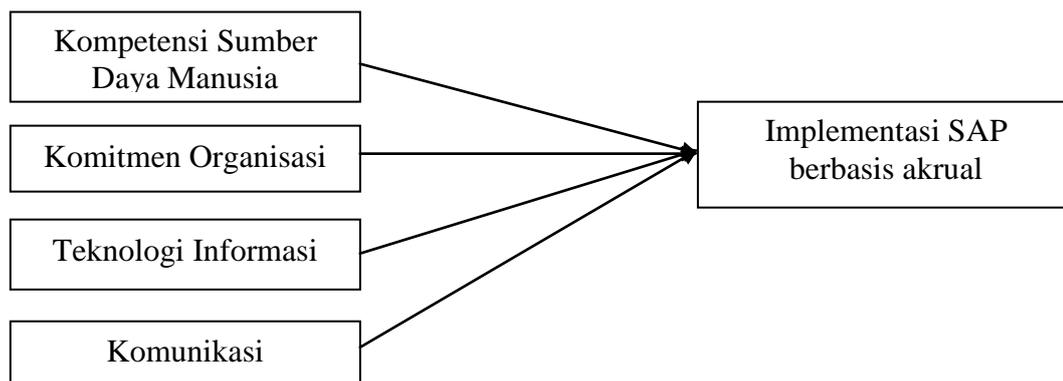
Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media menurut (Effendy, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Warsino (2009) berhasil membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Ouda (2008) menggunakan *Basic Requirements Model for Successful Implementation of Accruall Accounting in the Public Sector*. Dalam model persamaan tersebut salah satu komponen atau faktor yang dibutuhkan agar implementasi akuntansi akrual dapat dilaksanakan adalah strategi komunikasi yaitu berupa seminar, bimtek dan sosialisasi.

Penelitian lain yang meneliti pengaruh komunikasi terhadap implementasi diteliti oleh Ardiansyah (2012). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

H4 : Komunikasi berpengaruh terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda (*Multiple Regressien Analysis*) menggunakan bantuan komputer program SPSS. Persamaan regresinya adalah :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e$$

Dimana :

Y = Implementasi SAP berbasis akrual

X1= Kompetensi Sumber Daya Manusia

X2= Komitmen Organisasi

X3= Teknologi Informasi

X4= Komunikasi

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas data dari 28 pertanyaan dan dari 4 variabel penelitian memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel sehingga disimpulkan bahwa data penelitian valid. Dari hasil uji reliabilitas data, diketahui semua variabel penelitian memiliki nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,7, yaitu berkisar antara 0,701 s/d 0,850 sehingga data penelitian reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas data didapatkan hasil data menyebar secara normal, berdasarkan uji multikolinearitas didapatkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Dari hasil uji heterokedastisitas terlihat dari titik-titik pada *scatterplot* menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk pengujian hipotesis dengan analisa regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 20. Hasil analisis regresi terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,408	2,679		4,259	,000
1 KSDM	,184	,091	,262	2,013	,049
KO	,436	,189	,336	2,305	,025
TI	,072	,122	,095	,588	,558
KMNKS	-,029	,157	-,029	-,186	,853

a. Dependent Variable: Implementasi

Berdasarkan Tabel 3 tersebut diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 11,408 + 0,184 X_1 + 0,436 X_2 + 0,072 X_3 - 0,029 X_4 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: konstanta sebesar 11,048 artinya jika kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi nilainya adalah 0,000, maka implementasi SAP berbasis akrual (Y) nilainya 11,048. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) bernilai positif sebesar 0,184 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel kompetensi sumber daya manusia naik 1% maka implementasi SAP berbasis akrual (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,184%. Koefisien regresi variabel komitmen organisasi (X2) sebesar 0,436 dan bernilai positif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel komitmen organisasi naik 1% maka implementasi SAP berbasis akrual (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,436.

Koefisien regresi variabel teknologi informasi (X3) sebesar 0,072 dan bernilai positif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel teknologi informasi naik 1% maka implementasi SAP berbasis akrual (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,072%. Koefisien regresi variabel komunikasi (X4) sebesar 0,029 dan bernilai negatif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel komunikasi naik 1% maka implementasi SAP berbasis akrual (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,029%. Koefisien regresi variabel komitmen organisasi (X2) sebesar 0,436 dan yang paling tinggi diantara koefisien regresi variabel lainnya, sehingga variabel komitmen organisasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Nilai t tabel	Nilai t hitung	Sig.	Ket.
Hipotesis Pertama	1,997	2,013	.049	Berpengaruh
Hipotesis Kedua	1,997	2,305	.025	Berpengaruh
Hipotesis Ketiga	1,997	0,558	.558	Tidak Berpengaruh
Hipotesis Keempat	1,997	0,186	0,853	Tidak Berpengaruh

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	.315	.270	2,05329

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,270. Angka ini menjelaskan bahwa 27% variabel implementasi SAP berbasis akrual dipengaruhi oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan sisanya sebesar 73% dijelaskan oleh variabel lain.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t hitung (2,013) > nilai t tabel (1,997) dan nilai signifikansi 0,049 < α 0,005 yang berarti variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan ujung tombak dari implementasi SAP berbasis akrual sehingga diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi. Semakin tinggi kompetensi PPK-SKPD dan staf keuangan maka akan semakin baik implementasi SAP berbasis akrual. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Suhardjo (2013), pegawai negeri sipil daerah (sumber daya manusia) yang kompeten di bidang akuntansi (keuangan) akan mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ardiansyah (2012) dan Adventana (2013) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai t hitung (2,305) > nilai t tabel (1,997) dan nilai signifikansi 0,025 < α 0,005 sehingga disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Organisasi yang memiliki komitmen akan berusaha mendukung keberhasilan implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan lampiran I. Berdasarkan PP tersebut seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah mulai tahun 2015 ini berkewajiban melaksanakan SAP berbasis akrual, sehingga sudah menjadi tujuan organisasi/SKPD untuk ikut mengimplementasikannya. Semakin tinggi komitmen organisasi (termasuk komitmen PPK SKPD dan staf keuangan) maka akan semakin baik dan berhasil dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Adventana (2013) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Aritonang (2010) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 tahun 2005.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 variabel teknologi informasi memiliki nilai t hitung (0,558) < nilai t tabel (1,997) dan nilai signifikansi $0,558 > \alpha 0,005$ sehingga disimpulkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Hal ini diduga karena implementasi SAP berbasis akrual merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan teknologi informasi yang mampu untuk melaksanakan implementasi SAP berbasis akrual. Canggih atau tidaknya sistem teknologi informasi yang ada, laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, berdasarkan wawancara terhadap Kasubag Pembukuan dan Verifikasi Sekretariat Daerah diketahui bahwa selama ini proses penyusunan laporan keuangan lebih bersifat *top down*. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasi sebelumnya hanya sampai laporan realisasi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Neraca dilakukan secara manual. Apalagi proses penyusunan Laporan keuangan berdasarkan basis akrual yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 belum dilakukan karena proses penelitian dilakukan pada saat proses implementasi SAP berbasis akrual baru berjalan 4 (empat) bulan. Untuk bulan januari dan february, proses penginputan transaksi SKPD dengan sistem teknologi informasi masih dilakukan terpusat di bagian keuangan Sekretariat Daerah. Sistem teknologi informasi berbasis akrual baru benar-benar dipasang dan *online* untuk seluruh SKPD pada bulan Maret tahun 2015, sehingga PPK-SKPD dan staf keuangan yang menjadi responden belum sepenuhnya memahami pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembukuan transaksi sesuai dengan SAP berbasis akrual serta untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui variabel komunikasi memiliki nilai t hitung (0,186) < nilai t tabel (1,997) dan nilai signifikansi $0,853 > \alpha 0,005$ sehingga disimpulkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Hal ini diduga karena implementasi SAP berbasis akrual merupakan kewajiban dan amanat undang-undang untuk setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga SAP berbasis akrual telah dikomunikasikan sejak dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 dan proses transisi penggunaan SAP berbasis akrual telah dilakukan sampai dengan tahun anggaran 2014. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai persiapan implementasi mulai dari penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta mensosialisasikan peraturan tersebut ke seluruh SKPD.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga telah melakukan komunikasi yang baik dengan mensosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 pada akhir tahun 2013. Pelatihan untuk bendahara dan PPK-SKPD juga telah dilakukan sehingga pegawai telah mengetahui bahwa implementasi SAP berbasis akrual mulai berlangsung tahun 2015. Sehingga dengan komunikasi yang berlangsung baik tidak lagi berpengaruh terhadap proses implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Adventana (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga semakin tinggi komitmen organisasi dan kompetensi sumber daya manusia maka implementasi SAP berbasis akrual akan berjalan semakin baik. Untuk teknologi informasi dan komunikasi, tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: hasil dari pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual masih rendah sehingga masih banyak variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual seperti: motivasi, budaya organisasi dan manajemen aset, dan juga sebaiknya melakukan penelitian setelah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dilakukan, sehingga hasil implementasi SAP berbasis akrual akan terlihat dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Untuk Pemerintah Kabupaten Pelalawan hendaknya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi dengan menempatkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebagai PPK-SKPD dan staf di bagian keuangan SKPD agar implementasi SAP berbasis akrual berjalan lebih baik dan menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventana, G.A. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010*. Skripsi S1. Program Studi Akuntansi Universitas Admajaya, Yogyakarta.
- Agustino, L. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Ardiansyah, A. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual (KPPN Malang)*. Skripsi S1 Universitas Brawijaya, Malang.
- Aritonang, A.S dan Firman S. 2010. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Simposium Nasional XII*.
- Candra, P. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Pemerintah Kabupaten Klaten: Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya Terhadap Good Governance*. Tesis S2. Program Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Effendy, O.U. 2009. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Rosdakarya, Bandung.
- Gibson, J.L. 2000. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi 5. Erlangga, Jakarta.
- Indriasari, D dan Ertambang N. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak*.
- Ikhsan, A dan Muhamad I. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mathis, R.L dan John H.J. 2006. *Human Resource Management*. Edisi sepuluh. Salemba Empat, Jakarta.
- Mazmanian, D.H dan Paul A.S. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Ouda, H.A. 2008. Towards a Generic Model for Government Sector Reform: The New Zealand Experience. *International Journal on Government Financial Management*.

- Setiawan, G. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Warisno. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis S2. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- _____. 2013. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil.